

Belum Dapat Hak Keuangan,

Begini Aktivitas BPIP Kata Yudi Latif

Reporter: **Muhammad Hendartyo**

Editor: **Endri Kurniawati**

Jumat, 8 Juni 2018 08:47 WIB



Yudi Latif menerima ucapan duka di rumahnya. Bintaro, Jakarta Selatan, 25 Mei 2015. TEMPO/BAMBANG HARYMURTI

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pembinaan Ideologi Pancasila atau [BPIP](#), Yudi Latif yang baru saja mengumumkan pengunduran dirinya menyatakan kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga menjadi terbatas tanpa anggaran dan hak keuangan untuk lembaga itu. Namun, "Tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan." Yudi menyatakannya dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Juni 2018.

Yudi menyampaikan terima kasih atas keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan. Setiap hari, kata Yudi, ada saja kegiatan BPIP di seluruh pelosok tanah air hingga kerap membuat personel BPIP tak kenal waktu libur".

Baca:

[Yudi Latif Mundur dari BPIP, Ini Anggaran ...](#)

[Yudi Latif Mundur sebagai Kepala BPIP](#)

Kepadatan kegiatan ini dikerjakan dengan menjalin kerjasama dengan inisiatif komunitas masyarakat dan kementerian/lembaga. "Rasa tanggung jawab untuk secara gotong-royong menghidupkan Pancasila merupakan kekuatan positif yang membangkitkan optimisme."

Menurut dia, eksistensi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP berhasil bukan karena banyaknya klaim kegiatan yang dilakukan dengan bendera UKP-PIP/BPIP. Melainkan, kata Yudi, ketika inisiatif program kebudayaan Pancasila

oleh lembaga kenegaraan dan masyarakat bermekaran, meski tanpa keterlibatan dan bantuan UKP-PIP/BPIP.

Yudi mengatakan transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga. Juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semuanya itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda.

Baca:

[Peran BPIP di Tengah Persoalan Gaji yang Jadi ...](#)

[BPIP Minta Masyarakat Tak Permasalahkan Gaji](#)

Hingga setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. "Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden."

Perpres tentang hak keuangan personel [BPIP](#) ini, kata Yudi, tak kunjung keluar. Ia menduga karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri mengingat keterbatasan kewenangan lembaga yang telah disebutkan.